

DAMPAK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DALAM PENEGAKAN DEMOKRASI DI ERA DIGITAL *LEADERSHIP*

Fachmi Syam Arifin^{1*}, R.Rindu Garvera², Irfan Nursetiawan³, Nova Nurhaliza Haryadi⁴
^{1,2,3,4} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korepondensi : fachmisyam@unigal.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Indonesia menandai momen penting dalam penegakan demokrasi di era digital leadership. Tetapi, tingkat partisipasi dan pilihan masyarakat masih samar, serta belum terlihat signifikansi khususnya bagi para pemilih pemula. Studi ini menganalisis dampak Pemilu serentak dalam dinamika demokrasi, dengan fokus pada bagaimana teknologi digital memengaruhi pola komunikasi politik, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan publik terhadap proses pemilu. Penelitian ini juga mengkaji tantangan seperti penyebaran disinformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital leadership berperan krusial dalam mengelola ekosistem demokrasi yang inklusif dan adaptif, namun memerlukan penguatan regulasi dan literasi digital untuk meminimalkan risiko. Dengan demikian, Pemilu serentak 2024 menjadi momentum penting dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, serta menjunjung tinggi etika berpolitik.

Kata Kunci : Pemilu Serentak, Demokrasi, Digital *Leadership*, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

The 2024 simultaneous General Elections in Indonesia mark an important moment in upholding democracy in the era of digital leadership. However, the level of public participation and choice is still unclear, and has not been seen to be significant, especially for first-time voters. This study analyzes the impact of simultaneous elections on the dynamics of democracy, with a focus on how digital technology influences patterns of political communication, public engagement, and public oversight of the election process. This study also examines challenges such as the spread of disinformation. The results of the study show that digital leadership plays a crucial role in managing an inclusive and adaptive democratic ecosystem, but requires strengthening regulations and digital literacy to minimize risks. Thus, the 2024 simultaneous elections are an important momentum in integrating digital technology with democratic values to realize a more participatory, transparent, and public interest-oriented government, as well as upholding political ethics.

Keywords : Simultaneous elections, democracy, digital leadership, political participation.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi sebagai

mekanisme untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan suatu negara. Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak yang mencakup pemilihan

legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Pemilu serentak ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat legitimasi politik, serta mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam proses demokrasi. Namun, pelaksanaannya juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam konteks era digital yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan.

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, dan terlibat dalam politik. Teknologi digital, seperti media sosial dan platform berbasis internet, menjadi alat utama dalam kampanye politik, sosialisasi kebijakan, hingga pengawasan publik terhadap proses pemilu. Di sisi lain, era digital juga membuka ruang bagi tantangan baru, seperti penyebaran berita palsu, manipulasi opini publik, dan ancaman keamanan siber. Kondisi ini menuntut hadirnya kepemimpinan digital (*digital leadership*) yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana untuk mendukung proses demokrasi yang transparan, inklusif, dan berintegritas.

Integrasi kepemimpinan kolaboratif dengan prinsip-prinsip demokrasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan Pemilu 2024 di Indonesia (Fadilla & Nurdin, 2024). Partisipasi aktif masyarakat, menciptakan transparansi dalam proses pemilu, dan memperkuat akuntabilitas pemimpin yang terpilih. Kombinasi ini tidak hanya memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi untuk menghadapi tantangan di era digital yang semakin kompleks (Rohmatin et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks Pemilu serentak 2024, penegakan demokrasi di era digital leadership menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji. peran teknologi digital yang semakin dominan dalam menentukan pola komunikasi politik, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap proses pemilu. Digital leadership diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menghadapi tantangan seperti disinformasi, polarisasi politik, dan ancaman keamanan siber (Amelia et al., 2024). Kajian mendalam terhadap isu ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara terbaik untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung demokrasi yang inklusif dan berintegritas (Inzana et al., 2024; Mahmud Farikiansyah et al., 2024).

Aktivitas komunikasi politik yang ada di jagat maya tidak terlepas dari banyaknya pengguna internet di Indonesia. Menurut laporan APJII, penetrasi internet di Indonesia menunjukkan perbedaan berdasarkan gender dan usia. Dari segi gender, laki-laki memiliki penetrasi internet sebesar 79,32% dengan kontribusi 51,19%, sedangkan perempuan mencatat penetrasi

sebesar 77,36% dengan kontribusi 48,81%. Berdasarkan usia, kelompok pengguna terbesar adalah masyarakat berusia 13-18 tahun, dengan tingkat penetrasi 98,2% dan kontribusi 12,15%. Kelompok usia 19-34 tahun memiliki penetrasi 97,17% dan kontribusi 32,09%, sementara usia 35-54 tahun mencatat penetrasi 84,04% dengan kontribusi 33,67%. Adapun pengguna berusia 55 tahun ke atas memiliki penetrasi 47,62% dengan kontribusi 7,19% (sumber: [Katadata.co.id](#), 2024).

Di era digital yang didorong oleh kemajuan teknologi, peran generasi milenial dan Gen Z dalam politik dan pemilihan umum semakin krusial. Adapun jumlah pemilih di wilayah pulau Jawa, sebagai berikut :

Tabel. 1 Jumlah Pemilih Tahun 2024

No.	Provinsi	Jumlah Pemilih
1.	DKI Jakarta	8.252.897
2.	Jawa Barat	35.714.901
3.	Jawa Tengah	28.289.413
4.	Jawa Timur	31.402.838
5.	Banten	8.842.646
6.	D.I Yogyakarta	2.870.974

Sumber: [kpu.go.id](#), 2024.

Berdasarkan tabel. 1, data jumlah pemilih di beberapa provinsi, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pemilih tertinggi dengan 35.714.901 orang, diikuti oleh Jawa Timur (31.402.838 pemilih) dan Jawa Tengah (28.289.413 pemilih), menunjukkan dominasi jumlah pemilih di wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Provinsi DKI Jakarta (8.252.897 pemilih) dan Banten (8.842.646 pemilih) memiliki jumlah pemilih yang relatif seimbang, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan ketiga provinsi sebelumnya,

mencerminkan kepadatan pemilih yang terpusat di kota-kota besar. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta memiliki jumlah pemilih terendah dengan 2.870.974 orang, yang dapat disebabkan oleh luas wilayah yang lebih kecil dan populasi yang tidak sebesar provinsi lain. Data ini mengindikasikan bahwa strategi kampanye atau alokasi sumber daya dalam pemilu harus memperhatikan distribusi jumlah pemilih yang signifikan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah prioritas.

Demokrasi di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan munculnya digital leadership sebagai bentuk baru kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat partisipasi publik. Dalam konteks ini, teknologi digital tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi tetapi juga menjadi medium interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan interaksi satu arah secara *indirect* dalam mengkomunikasikan visi, misi, dan strategi politik untuk mendapatkan suara dari khalayak ramai.

Platform seperti media sosial, aplikasi partisipatif, dan situs web resmi pemerintah memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, menyuarakan kritik, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, era ini juga menuntut pemimpin untuk memiliki kemampuan literasi digital yang tinggi, kepemimpinan yang transparan, serta etika dalam memanfaatkan teknologi (Kurnia & Soeratin, 2023; Marlina et al., 2021).

Di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi. Penyebaran informasi palsu, manipulasi opini publik, dan ancaman terhadap privasi menjadi isu yang perlu diatasi untuk menjaga integritas demokrasi. Digital leadership tidak hanya dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, tetapi juga memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, keadilan, dan kesetaraan (Firdausiyah & Sofa, 2024). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung demokrasi yang sehat. Dengan demikian, demokrasi di era digital leadership membuka peluang besar untuk memperkuat partisipasi warga, tetapi juga memerlukan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan yang ada (Antika et al., 2024).

Strategi demokrasi digital yang berkelanjutan di masa depan harus mencakup penguatan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur teknologi yang merata, serta peningkatan keamanan siber untuk melindungi data dan privasi publik. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan platform digital yang inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini juga harus disertai regulasi yang adaptif namun tegas, guna mencegah penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoaks dan manipulasi data (Nursetiawan et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Pemilu serentak tahun 2024 terhadap dinamika demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada peran digital leadership dalam

mengelola tantangan dan peluang yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi demokrasi digital yang berkelanjutan di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam penegakan demokrasi di era digital leadership. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel media, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif yang telah dikaji sebelumnya terkait dengan hubungan antara demokrasi, pemilu serentak, dan *digital leadership*.

Proses penelitian dimulai dengan pencarian literatur yang membahas tema utama, yaitu penerapan teknologi dalam pemilu, transformasi kepemimpinan digital, serta tantangan dan peluang demokrasi di era digital. Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap kredibilitas dan relevansi sumber-sumber tersebut untuk menjamin kualitas analisis data (Asy'arie et al., 2024). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi yang muncul dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dalam konteks penguatan demokrasi (Hadi, 2019). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana *digital leadership* dapat memengaruhi proses demokrasi melalui pemilu serentak di Indonesia (Fathur Rahman, 2024).

Langkah-langkah penelitian ini meliputi: (1) menentukan fokus penelitian; (2) mengumpulkan data; (3) analisis data; (4) sintesis analisis; dan (5) simpulan. Hasil analisis disintesis dalam bentuk narasi argumentatif yang menjelaskan implikasi Pemilu Serentak 2024 terhadap demokrasi dan digital leadership, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan bermanfaat bagi pengembangan kajian demokrasi digital di Indonesia. Penelitian ini hanya fokus pada kajian netnografi dan literatur pustaka dalam Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Hal ini bertujuan secara langsung untuk mengkonstruksi intisari opini dalam perkembangan politik di dunia maya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam konteks adaptasi masyarakat terhadap

penggunaan teknologi digital. Pemilu serentak kali ini ditandai dengan penerapan berbagai inovasi, seperti kampanye politik melalui platform informasi daring. Perubahan pergeseran komunikasi politik yang hanya berupa retorika dalam media konvensional, saat ini beralih ke media digital.

Aplikasi berbasis sharing short video menjadi primadona bagi politisi untuk menyampaikan visi dan misi dalam Pemilu di tahun 2024. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram (IG) menjadi media kampanye yang berdampak signifikan terhadap tingkat elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (Rustandi, 2014). Para influencer dan pegiat media sosial gencar membagikan asumsi dan aspirasi, serta dukungan terhadap pasangan calon tertentu di media sosial (Bayu, 2019). Adapun tingkat elektabilitas dari calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel. 2 Tingkat Elektabilitas Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024

No.	Lembaga Survei	Pasangan Calon	Presentase Pemilih
1.	Survei dan Polling Indonesia (SPIN)	Prabowo-Gibran	50.9%
		Ganjar-Mahfud	23.5%
		Anies-Muhaimin	18.9%
		Belum punya pilihan	6.9%
2.	Indonesia Political Opinion (IPO)	Prabowo-Gibran	42.3%
		Ganjar-Mahfud	34.5%
		Anies-Muhaimin	21.5%
3.	Ipsos Public Affairs	Prabowo-Gibran	48.05%
		Ganjar-Mahfud	21.80%
		Anies-Muhaimin	18.35%

Sumber: <https://katadata.co.id>, 2024.

Berdasarkan tabel. 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo-Gibran mendominasi tingkat

elektabilitas dalam Pemilu 2024. Hal ini tentunya dapat dijadikan landasan dalam memilih strategi kampanye yang tepat

untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Berdasarkan dari lembaga survei tersebut pasangan Prabowo-Gibran mempunyai nilai rerata presentase sebesar 47.08%. Walaupun demikian, hasil dari Pemilu 2024 diserahkan sepenuhnya kepada pemilih.

Demokrasi menjadi pilar terpenting dalam terwujudnya proses Pemilu di Indonesia dan berdampak pada konstruksi konstitusi dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Ciri utama demokrasi konstitusional terletak pada prinsip bahwa pemerintahan demokratis memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak diperbolehkan bertindak semena-mena terhadap warga negaranya (Assyayuti, 2022).

Untuk menjaga netralitas dan kesesuaian penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, terdapat aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi pemilu secara transparan. Data awal menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dibandingkan pemilu sebelumnya, didorong oleh tingginya minat pemilih muda yang aktif di media sosial.

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan untuk membantu penyelenggaraan Pemilu tersebut bernama Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP). SIREKAP adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung publikasi hasil penghitungan suara serta proses rekapitulasi hasil Pemilu (Hanafi & R, 2024). Walaupun demikian, perkembangan teknologi digital menjadikan Pemilu lebih meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat.

Kampanye digital yang masif melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube turut menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi berperan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Konsepsi dalam implementasi Pemilihan Umum (Pemilu) bermula dari penegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat juga menghadapi tantangan yang signifikan. Ketimpangan akses teknologi, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu hambatan utama yang mengurangi partisipasi sebagian masyarakat. Selain itu, penyebaran hoaks dan misinformasi di media sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas proses pemilu. Tingkat literasi digital yang rendah di beberapa segmen masyarakat menyebabkan keraguan terhadap keamanan dan validitas sistem digital yang digunakan dalam pemilu. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan partisipasi secara keseluruhan, Pemilu serentak 2024 juga menggarisbawahi perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan inklusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu di era digital.

2. Penerapan Digital Leadership

Penerapan digital leadership dalam komunikasi politik menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun hubungan yang efektif antara pemimpin politik dan masyarakat di era digital. Digital leadership mengacu pada kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka secara langsung kepada publik. Platform media sosial

seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah menjadi alat utama dalam komunikasi politik, memungkinkan pemimpin untuk menyampaikan pesan mereka secara cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pemimpin untuk menerima umpan balik secara langsung dari masyarakat, menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan responsif.

Keberhasilan penerapan digital leadership juga tergantung pada bagaimana pemimpin politik memanfaatkan teknologi untuk menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan publik. Misalnya, melalui siaran langsung, infografis, atau video singkat, pemimpin dapat menjelaskan kebijakan atau keputusan secara rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi penyebaran informasi yang salah. Dalam konteks kampanye politik, digital leadership memungkinkan calon pemimpin untuk memperkuat citra mereka melalui narasi yang konsisten di berbagai platform digital. Pemimpin yang mampu beradaptasi dengan gaya komunikasi digital cenderung lebih mudah diterima oleh pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di dunia maya.

Namun, penerapan digital leadership juga menghadirkan sejumlah tantangan, seperti ancaman hoaks dan manipulasi opini publik. Pemimpin politik dituntut untuk memiliki literasi digital yang tinggi guna memastikan pesan yang disampaikan melalui media digital tetap kredibel dan akurat. Selain itu, penggunaan media sosial untuk komunikasi politik harus diimbangi dengan kebijakan etis yang mencegah penyalahgunaan data pribadi atau kampanye negatif. Dengan strategi yang

tepat, digital leadership dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperkuat komunikasi politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif di era teknologi.

3. Implikasi Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks politik, pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menentukan legitimasi pemerintahan dan memfasilitasi rotasi kepemimpinan secara damai. Proses ini mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi, di mana rakyat memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan publik melalui pemimpin yang dipilih. Selain itu, pemilu juga memengaruhi stabilitas politik dengan memberikan saluran bagi aspirasi masyarakat untuk diakomodasi secara resmi. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, pemilu dapat memicu konflik politik dan polarisasi, terutama jika integritas prosesnya diragukan.

Dari perspektif sosial, pemilu menjadi momen penting yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partisipasi aktif dalam pemilu mencerminkan kesadaran politik rakyat dan menjadi indikator kuat dari tingkat kematangan demokrasi suatu negara. Selain itu, pemilu dapat memupuk rasa persatuan nasional dengan menghadirkan diskusi mengenai isu-isu yang relevan bagi semua kelompok masyarakat. Di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan edukasi politik yang memadai, pemilu juga dapat memperdalam ketimpangan sosial, terutama apabila hoaks dan manipulasi informasi mendominasi ruang publik. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga alat

transformasi sosial yang harus dirancang untuk memperkuat demokrasi secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Pemilu Serentak Tahun 2024 berdampak signifikan terhadap penegakan demokrasi di Indonesia. Pemilu tahun ini berperan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi rakyat, kualitas parpol, kedaulatan rakyat, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin matang dan inklusif, dengan rakyat yang lebih sadar akan pentingnya proses demokrasi dan persatuan bangsa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amelia, L., Sihabudin, A. A., & Nursetiawan, I. (2024). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Industri Rumah Tangga di Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. In *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* (Vol. 2, Issue 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v2i3.248>
- Antika, Y., Adhellya Santika, D., & Alvionita, N. (2024). Peran Kepemimpinan Demokratis Terhadap Keterlibatan Karyawan Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i1.5994>
- Assyayuti, M. M. (2022). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art5>
- Asy'arie, B. F., Mun'im, Z., Ma'ruf, R. A., Susanti, S. S., & Kurniawati, D. (2024). Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 16(1), 126–145. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i1.2947>
- Bayu, C. (2019). Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019. In *JURNAL TRANSLITERA* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/translitera.v9i1.905>
- Fadilla, Y. N., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Fathur Rahman, F. (2024). Digital Participation and Active Involvement of Civil Society in Organizing Ideal Elections. In *Number I, Mei* (Vol. 9). <https://journal.isnusumut.org/index.php/ins9mj/article/view/28>
- Firdausiyah, J., & Sofa, A. R. (2024). Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi. *Jurnal Budi Pekerti*

- Agama Islam*, 3(1), 102–131.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>
- Hadi, A. (2019). Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarga negaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8(2), 123–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661>
- Hanafi, M. R., & R, R. K. (2024). Analisis Sentimen pada Ulasan Aplikasi Sirekap di Google Play Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(4), 1578–1586. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i4.1693>
- Inzana, N., Maulana, A. A., & Sari, P. M. (2024). Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.106>
- Kurnia, D. S., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Suatu Institusi dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media dengan Kepemimpinan Manajemen Pendidikan Islam. *ANWARUL*, 3(4), 647–661. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1277>
- Mahmud Farikiansyah, I., Nailis Salamah, M., Rokhimah, ur, Ma, L., Nabila Faiqah Faruq, F., & Afrizatifurrohman Al Gufron, M. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. In *Journal of Education Research* (Vol. 5, Issue 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Nurdin, A., Anwar, R., Sujai, I., & Firmanto, C. (2024). Pelatihan Digital Leadership Bagi Perangkat Desa Di Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 4(2), 351–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/mallomo.v4i2.1496>
- Rohmatin, Z., Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., Rizqullah, R., & Hasibuan, H. A. (2024). Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(4), 38–49. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.454>
- Rustandi, D. (2014). *Dinamika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu 2014*. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/101>.